



Dampak Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Pengembangan UMKM

(Studi Kasus Nasabah BSI Cabang Sibolga, Sumatera Utara)

Imam Hidayat Simanungkalit¹, Rahmi Isriani²

¹⁻²Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: imamhidayatsimanungkalit459@gmail.com¹, rahmiisriani@uinbukittinggi.ac.id²

*Penulis Korespondensi: imamhidayatsimanungkalit459@gmail.com

Abstract. This study examines the role of People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) financing in supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sibolga City. It aims to analyze the impact of KUR financing on MSME development, identify challenges faced by beneficiaries, and examine its implementation from an Islamic perspective at Bank Syariah Indonesia (BSI) Sibolga Branch. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving BSI representatives and KUR beneficiaries, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The findings show that KUR financing positively contributes to MSME development by increasing business capital, production capacity, sales turnover, product diversification, business expansion, and family welfare. However, several challenges remain, including weak financial management, limited business records, inadequate human resources, administrative requirements, income fluctuations, and delayed installment payments. From an Islamic perspective, KUR financing at BSI Sibolga Branch complies with the principles of justice, prohibition of riba, and transparency in contractual agreements, although customers' understanding of Islamic financing contracts requires further improvement. Enhanced mentoring and financial education are recommended to maximize program effectiveness.

Keywords: Islamic Financing; Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); People's Business Credit (KUR); Sibolga City; Small Business Development.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sibolga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan KUR terhadap pengembangan UMKM, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penerima pembiayaan, serta mengkaji implementasinya dari perspektif Islam di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sibolga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan perwakilan BSI serta penerima pembiayaan KUR, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan UMKM melalui peningkatan modal usaha, kapasitas produksi, omzet penjualan, diversifikasi produk, perluasan usaha, dan kesejahteraan keluarga. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain lemahnya pengelolaan keuangan, keterbatasan pencatatan usaha, sumber daya manusia yang belum memadai, persyaratan administrasi, fluktuasi pendapatan usaha, serta keterlambatan pembayaran angsuran. Dari perspektif Islam, pembiayaan KUR di BSI Cabang Sibolga telah sesuai dengan prinsip keadilan, larangan riba, dan transparansi dalam akad, meskipun pemahaman nasabah terhadap akad pembiayaan syariah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan edukasi keuangan yang lebih optimal untuk memaksimalkan efektivitas program.

Kata Kunci: Kota Sibolga; Kredit Usaha Rakyat (KUR); Pembiayaan Syariah; Pengembangan Usaha Kecil; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selain menjadi penggerak ekonomi domestik, UMKM juga memiliki daya tahan yang relatif tinggi dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi sehingga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Bank Indonesia, 2023; Sari et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM diposisikan sebagai sektor strategis yang perlu memperoleh dukungan melalui kebijakan pemerintah, termasuk kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008).

Meskipun memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian nasional, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satu permasalahan yang paling dominan adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha. Rendahnya kapasitas permodalan menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, mengadopsi teknologi, maupun meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, sebagian pelaku UMKM belum memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal sehingga akses terhadap sumber pembiayaan masih terbatas (Agustina & Kurniasari, 2023; Rahmawati & Wibowo, 2022).

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan akses modal bagi pelaku UMKM yang layak namun belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pembiayaan komersial. Program KUR diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, memperkuat struktur ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah secara konsisten menjadikan KUR sebagai program prioritas dalam mendukung pertumbuhan UMKM karena terbukti mampu memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023; Bank Indonesia, 2023).

Dalam perkembangannya, implementasi program KUR tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional, tetapi juga oleh perbankan syariah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan KUR Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan saling menguntungkan tanpa menerapkan sistem bunga (riba).

Skema pembiayaan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat muslim sekaligus meningkatkan akses pembiayaan yang produktif bagi pelaku UMKM (Sobarna, 2021; Mulyani et al., 2024). Perkembangan pembiayaan BSI juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas pembiayaan nasional (Sari et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan KUR memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil. Pembiayaan tersebut mampu meningkatkan modal kerja, memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan omzet penjualan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha (Ayyubi et al., 2018; Lubis & Syahbudi, 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran KUR berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM agribisnis maupun sektor perdagangan (Cahyani & Setiawan, 2023; Santiadin et al., 2023). Selain itu, program pembiayaan pemerintah bagi UMKM terbukti mampu memperbaiki perilaku ekonomi rumah tangga penerima manfaat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan (Mardanugraha et al., 2018).

Meskipun demikian, efektivitas program KUR tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan penerima dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi KUR, seperti rendahnya literasi keuangan, lemahnya kemampuan manajerial usaha, ketidakstabilan pendapatan, serta tingginya risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Faktor-faktor tersebut menyebabkan sebagian penerima pembiayaan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran sehingga berdampak pada keberlanjutan program pembiayaan UMKM (Rahmawati & Wibowo, 2022; Agustina & Kurniasari, 2023).

Fenomena tersebut juga ditemukan pada pelaksanaan Program KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sibolga. Berdasarkan data internal BSI Cabang Sibolga periode 2024–2025, sebanyak 82 pelaku UMKM telah memperoleh pembiayaan KUR dengan total penyaluran mencapai Rp8,939 miliar. Program tersebut telah memberikan tambahan modal usaha kepada pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, perikanan, pertanian, jasa, dan usaha rumah tangga. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah permasalahan, terutama meningkatnya tunggakan pembayaran angsuran pada sebagian penerima pembiayaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha akibat faktor cuaca yang memengaruhi hasil tangkapan nelayan, fluktuasi daya beli masyarakat, kenaikan harga bahan baku, serta lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan

usaha. Selain faktor ekonomi, rendahnya disiplin dalam pengelolaan arus kas usaha dan kurangnya perencanaan keuangan juga menjadi penyebab munculnya pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program KUR Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh akses terhadap modal, tetapi juga ditentukan oleh kualitas manajemen usaha penerima pembiayaan (Lubis & Syahbudi, 2022).

Penelitian mengenai dampak pembiayaan KUR Syariah pada BSI Cabang Sibolga memiliki urgensi yang tinggi karena evaluasi terhadap efektivitas program pembiayaan diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar mampu meningkatkan perkembangan usaha, produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku UMKM secara berkelanjutan. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar bagi pihak perbankan dalam menyusun strategi pembinaan, pendampingan usaha, mitigasi risiko pembiayaan, serta peningkatan kualitas penyaluran KUR sehingga tingkat pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada pengaruh pembiayaan KUR terhadap peningkatan pendapatan, omzet, atau modal usaha UMKM (Cahyani & Setiawan, 2023; Santiadin et al., 2023; Putri & Hidayat, 2022). Penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji keterkaitan antara efektivitas pembiayaan, perkembangan usaha, serta faktor-faktor penyebab munculnya tunggakan pembayaran dalam implementasi KUR Syariah pada Bank Syariah Indonesia, khususnya di wilayah Sibolga, Sumatera Utara. Selain itu, penelitian dengan objek nasabah BSI Cabang Sibolga masih sangat terbatas sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas program KUR Syariah di daerah pesisir yang karakteristik usahanya didominasi oleh sektor perikanan, perdagangan, dan usaha mikro berbasis rumah tangga.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Sibolga, Sumatera Utara. Selain mengkaji pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha, penelitian ini juga menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pembiayaan serta penyebab munculnya tunggakan pembayaran pada penerima KUR. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi bahan evaluasi bagi Bank Syariah Indonesia, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas implementasi program KUR Syariah guna mendukung pertumbuhan UMKM yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sibolga.

Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sibolga dan pada lokasi usaha nasabah penerima KUR selama periode Maret 2025 hingga penelitian selesai. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak BSI Cabang Sibolga dan nasabah UMKM penerima KUR melalui interaksi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pembiayaan, brosur produk KUR, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses pembiayaan, pemanfaatan dana, perkembangan usaha, serta kendala yang dihadapi pelaku UMKM.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti memahami pola dan hubungan antar temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memverifikasi temuan berdasarkan data lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas, validitas, dan kepercayaan yang tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Dampak KUR terhadap UMKM

a. Perbandingan hasil penelitian dengan teori

Secara teoritis, pembiayaan modal usaha memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan omzet dan kesejahteraan pelaku UMKM. Teori pengembangan UMKM menyatakan bahwa keterbatasan modal merupakan salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan usaha kecil, sehingga akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau dapat menjadi pendorong utama perkembangan usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR yang diberikan oleh BSI Cabang Sibolga telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal usaha UMKM.

Tambahan modal tersebut digunakan oleh nasabah untuk membeli bahan baku, menambah alat produksi, serta menunjang operasional usaha sehari-hari. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan modal kerja akan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas produksi dan keberlangsungan usaha. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh UMKM mengalami peningkatan omzet yang signifikan. Sebagian pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor musiman seperti nelayan dan pedagang kecil, mengalami fluktuasi pendapatan akibat faktor eksternal seperti cuaca dan daya beli masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara teoritis pembiayaan memang berperan penting, tetapi keberhasilan usaha juga dipengaruhi oleh faktor non-modal, seperti kondisi pasar dan kemampuan manajerial pelaku UMKM.

b. Kesesuaian dengan penelitian terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pembiayaan KUR berkontribusi positif terhadap pengembangan UMKM, terutama dalam peningkatan modal usaha, kapasitas produksi, dan perluasan usaha. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa UMKM yang mampu mengelola pembiayaan secara efektif cenderung mengalami peningkatan omzet dan stabilitas usaha. Selain itu, penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa kendala dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan usaha menjadi faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan KUR. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian di Kota Sibolga, di mana sebagian nasabah KUR masih mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan dan pencatatan usaha, yang berdampak pada kemampuan pengembalian pembiayaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada konteks lokal UMKM di Kota Sibolga, khususnya sektor usaha yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan ekonomi daerah. Hal ini memberikan kontribusi empiris bahwa efektivitas pembiayaan KUR tidak hanya ditentukan oleh sistem perbankan, tetapi juga oleh karakteristik usaha dan lingkungan ekonomi setempat.

Pembahasan Kendala dan Solusi

Kendala internal UMKM terutama berkaitan dengan lemahnya manajemen keuangan dan kurangnya pencatatan usaha. Sebagian nasabah KUR belum memisahkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga, sehingga arus kas usaha tidak terkontrol secara baik. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam mengatur pembayaran angsuran pembiayaan, terutama pada saat pendapatan usaha mengalami penurunan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penyebab kendala.

Banyak pelaku UMKM mengelola usahanya secara mandiri tanpa dukungan tenaga kerja yang memiliki kemampuan administrasi dan manajerial. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas penggunaan dana pembiayaan dan terbatasnya kemampuan usaha untuk berkembang secara optimal.

Sementara itu, kendala eksternal berasal dari prosedur dan ketentuan perbankan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Meskipun pembiayaan KUR relatif lebih mudah dibandingkan pembiayaan komersial lainnya, sebagian UMKM masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan angsuran. Jangka waktu pengembalian dan besaran angsuran yang tetap menjadi tantangan bagi UMKM dengan pendapatan yang bersifat fluktuatif, seperti nelayan dan pedagang kecil.

Faktor lain yang memengaruhi kendala pengembalian pembiayaan adalah fluktuasi pendapatan usaha. Ketidakstabilan omzet menyebabkan sebagian nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan tunggakan. Kondisi ini sejalan dengan identifikasi masalah penelitian yang menunjukkan bahwa penurunan pendapatan usaha menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas pembiayaan KUR dalam mendorong perkembangan UMKM.

Pembahasan Perspektif Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan usaha bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghindari praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR yang diterapkan di BSI Cabang Sibolga pada prinsipnya relevan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya dalam aspek keadilan, larangan riba, dan transparansi akad. Prinsip keadilan tercermin dalam mekanisme pembiayaan KUR yang memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM dengan persyaratan yang relatif terjangkau dibandingkan pembiayaan komersial. Skema ini memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh modal tanpa tekanan bunga yang memberatkan, sehingga sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Selain itu, implementasi KUR di BSI menggunakan akad pembiayaan syariah yang menghindari unsur riba. Penentuan margin dilakukan secara transparan di awal akad dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga nasabah memiliki kepastian mengenai kewajiban pembayaran. Hal ini sesuai dengan prinsip larangan riba dalam Islam serta ketentuan akad muamalah yang menekankan kejelasan (*al-bayan*) dan kesepakatan (*taradhi*). Prinsip transparansi akad juga terlihat dari adanya penjelasan pihak bank kepada nasabah mengenai jenis akad, mekanisme pembiayaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa tingkat pemahaman nasabah terhadap akad syariah masih bervariasi. Sebagian nasabah memahami akad secara umum, sementara sebagian lainnya hanya berfokus pada aspek pencairan dan angsuran pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara praktik pembiayaan KUR telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah. Secara keseluruhan, pembiayaan KUR di BSI Cabang Sibolga memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan ekonomi Islam (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kedisiplinan pengelolaan usaha oleh nasabah serta peran aktif pihak bank dalam memberikan edukasi dan pendampingan berbasis prinsip syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BSI KC Sibolga, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, terutama dalam meningkatkan permodalan, kapasitas produksi, pengembangan jenis usaha, serta perluasan pemasaran. Tambahan modal yang diperoleh juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku UMKM. Selain itu, program KUR memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui persyaratan yang relatif mudah, margin yang terjangkau, dan dukungan kebijakan pemerintah sehingga menjadi solusi bagi pelaku usaha yang kesulitan memperoleh modal dari lembaga keuangan formal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan kemampuan manajemen usaha, dan belum optimalnya pemanfaatan dana pembiayaan untuk pengembangan usaha. Secara keseluruhan, pembiayaan KUR memiliki peran yang strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, D. M., & Kurniasari, W. (2023). Peranan pembiayaan BSI KUR mikro dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM (Studi kasus BSI Lamongan Wahidin). *Buletin Ekonomika Pembangunan*. <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.20035>
- Ayyubi, S. E., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). The effect of microfinance on micro and small enterprises' performance and the improvement of their business opportunity. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(4), 663–675. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.1996>

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. Bank Indonesia.
- Cahyani, N. T., & Setiawan, I. (2023). Pengaruh efektivitas pembiayaan KUR terhadap pendapatan UMKM agribisnis Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(2). <https://doi.org/10.25157/ma.v9i2.10963>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan UMKM*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Lubis, H. K., & Syahbudi, M. (2022). Pengaruh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dalam meningkatkan UMKM yang berdaya saing di Kota Binjai. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13289>
- Mardanugraha, E., Safuan, S., Agriva, M., & Yappy, B. (2018). The impact of government MSME financing program to the recipients household economic behavior. *Journal of Small Business and Entrepreneurship Development*. <https://doi.org/10.15640/jsbed.v6n2a3>
- Mulyani, S., Jannah, N., & Syafina, L. (2024). Analisis implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah dalam meningkatkan pendapatan UMKM: Studi kasus pada Pegadaian Cabang Mandala. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.4290>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pasaribu, N. A., Tambunan, Y. S., & Simamora, K. (2023). Analisis dampak kredit mikro terhadap perkembangan usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi kasus: Nasabah KSP CU Pardomuan Pakkat Cabang Baru). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 1(1). <https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/JISE/article/view/115>
- Putri, R. A., & Hidayat, T. (2022). Pengaruh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 23(2), 145–158.
- Rahmawati, D., & Wibowo, H. (2022). Analisis efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan kinerja UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 55–68.
- Santiadin, R., Muhammad, R. N., Rosmiati, M., & Suwondo, S. (2023). Pengaruh pemberian KUR terhadap pendapatan dan pengembangan UMKM di Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya (Studi kasus pada BRI Unit Sukaratu). *Indonesian Accounting Literacy Journal*. <https://doi.org/10.35313/ialj.v3i3.4989>
- Sari, W. R., Nabbila, F. L., & Putri, D. F. (2023). Perkembangan pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam mendorong pertumbuhan UMKM. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (DINAMIKA)*. <https://doi.org/10.51903/dinamika.v3i2.398>
- Sobarna, N. (2021). Perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93*.